

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan ialah sebuah keadaan yang mana individu itu tak mampu mencukupi kebutuhan primernya semisal misalnya sandang, pangan, papan, kesehatan yang layak, pula pendidikan. Kemiskinan juga ialah isu ataupun persoalan yang bersifat kompleks yang harus di hadapi oleh setiap negara. Kemiskinan ialah isu mendunia yang dihadapi oleh seluruh negara, baik negara berkembang ataupun negara maju. Kemiskinan pula mampu dihubungkan dengan satu jenis konsumsi. Seseorang mampu dinamai miskin sebab tak mempunyai tempat tinggal, kurangnya pangan ataupun memiliki kesehatan yang buruk. Kemiskinan mampu diinterpretasikan selaku kondisi dimana seseorang keluarga ataupun anggota masyarakat tak memiliki abilitas guna memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak sebagaimana anggota masyarakat lainnya secara harfiah Syami dalam (Zartika,2016).

Kemiskinan ialah isu multidimensi yang tak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tapi pula sosiokultural serta politik. Permasalahan kemiskinan dianggap selaku salah satu hambatan pada aktivitas pembangunan suatu negara. Salah satu negara yang masih terbelit isu kemiskinan ialah Indonesia. Di Indonesia, permasalahan soal kemiskinan senantiasa jadi sorotan utama yang berkaitan dengan upaya pemerintahan guna memaksimalkan kemakmuran sosial masyarakatnya. Isu kemiskinan pula dilatarbelakangi oleh banyaknya masyarakat yang masuk kedalam kategori pengangguran terselubung. Pengangguran model ini menduduki posisi yang lumayan besar di Indonesia.

Menjadikan banyaknya keluarga Indonesia yang masih menemui kesukaran guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

Isu kemiskinan yang ada di Indonesia dipaparkan Suharto (dalam Tirani, 2017) ialah isu sosial yang masih relevan guna didiskusikan secara terus menerus. Semua ini dikarenakan isu kemiskinan sudah ada sejak lama serta masih hadir di tengah- tengah Indonesia. Hal ini pula sebab Indonesia ialah salah satu negara berkembang berjumlah penduduk yang senantiasa naik, menjadikan tingkat kemakmuran masyarakatnya masih jauh di bawah tingkat kemakmuran negara maju. Seluruh negara di dunia sepakat bahwasanya kemiskinan ialah isu kemanusiaan yang jadi hambatan kemakmuran serta peradaban.

Isu kemiskinan sangat membutuhkan penyelesaian secara serius guna terhindar daripada kemerosotan kualitas generasi paa periode mendatang. Terkait usaha mengurangi kemiskinan pula diperlukan pendekatan kemanusiaan yang menekan pemenuhan kebutuhan primer, pendekatan kesejahteraan lewat optimalisasi serta rekonstruksi usaha ekonomi produktif, pula pengadaan jaminan serta perlindungan sosial. Penyelesaian kemiskinan mesti dilaksanakan secara komprehensif serta terpadu pula mengikutsertakan keseluruhan pihak. Tahun 2021 bapan pusat statistik Indonesia memaparkan tingkat kemiskinan perkotaan pada provinsi Jawa Timur kurun bulan maret sebesar 8.38% pada bulan September mencapai 7,99 sedangkan di pedesaan pada bulan maret 15.05 dan di bulan September 13,79.

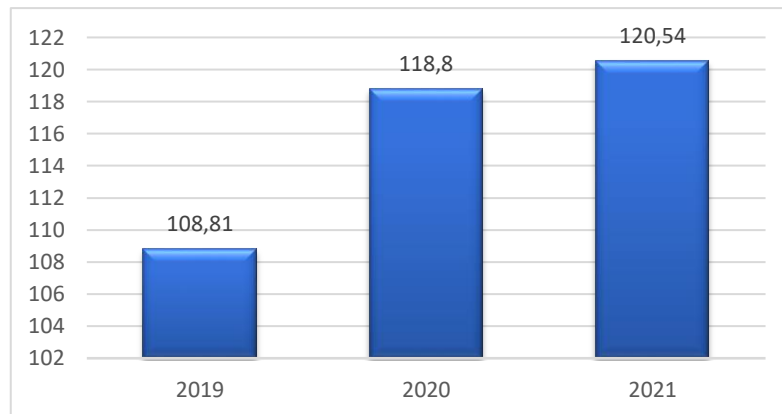
Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Ribuan Jiwa)		
	2019	2020	2021
Pacitan	75,86	80,82	84,19
Ponorogo	83,97	86,74	89,94
Trenggalek	76,44	81,06	84,89
Tulungagung	70,01	76,40	78,59
Blitar	103,75	108,55	112,62
Kediri	163,95	179,93	184,49
Malang	246,60	265,56	276,58
Lumajang	98,88	102,60	105,25
Jember	226,57	247,99	257,09
Banyuwangi	121,37	130,37	130,93
Bondowoso	103,33	110,24	115,18
Situbondo	76,44	83,74	86,95
Probolinggo	207,22	218,35	223,32
Pasuruan	141,09	151,43	159,78
Sidoarjo	119,29	127,05	137,15
Mojokerto	108,81	118,80	120,54
Jombang	116,44	125,94	127,30
Nganjuk	118,51	122,73	125,53
Madiun	71,91	78,30	81,61
Magetan	60,43	65,09	67,75
Ngawi	119,43	128,19	130,81
Bojonegoro	154,64	161,10	166,52
Tuban	170,80	187,13	192,58
Lamongan	157,11	164,68	166,82
Gresik	148,61	164,05	166,35
Bangkalan	186,11	204,00	215,97
Sampang	202,21	224,74	237,23
Pamekasan	122,43	129,41	137,12
Sumenep	211,98	220,23	224,73

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pada Provinsi Jawa Timur

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Berdasar grafik diatas dijelaskan bahwasanya populasi penduduk miskin pada Kabupaten pada Provinsi Jawa Timur mulai 3 tahun terakhir sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 naik tiap tahunnya.

**Grafik 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Mojokerto
(Ribu Jiwa)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Mojokerto 2022

Berdasar kepada grafik di atas menunjukkan bahwasanya pada Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin pada 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021.

Sementara dalam mengatasi masalah kemiskinan Pemerintah Indonesia membangun Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada tingkatan pusat serta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pada tingkatan daerah pada tahun 2010. Strategi terkait berbentuk program perlindungan sosial yakni bantuan-bantuan sosial. Untuk menunjang dan mewujudkan program tersebut pemerintah pun membuat empat strategi yakni membenahi program perlindungan sosial, memaksimalkan akses terkait layanan fundamen, pemberdayagunaan masyarakat miskin serta merekonstruksi pembangunan yang inklusif. Program yang digagas oleh TNP2K yakni berbasis keluarga, pemberdayagunaan masyarakat, serta pemberdayagunaan bisnis mikro serta kecil. Keseluruhan program terbagi menjadi 3 klaster yakni klaster 1 untuk

program Jamkesmas, BSM, PKH, dan Raskin, klaster 2 untuk program PNPM dan klaster 3 untuk program KUR.

Salah satu program bantuan sosial yang di turunkan oleh pemerintah ialah BPNT, di mana program BPNT ini program bantuan yang pencairannya berupa bahan pokok hasil bumi bukan uang tunai. Bahan pokok tersebut mencukupi indikator 4 sehat 5 sempurna yang disalurkan oleh e-warong yang di sediakan oleh pemerintah dan sudah dipersebarluaskan di seluruh indosenia khusus nya di daerah – daerah kecil yang jumlah masyarakat kurang mempunya banyak. Pemerintah menurunkan bantuan untuk masyarakat kurang mampu supaya perekomonian Indonesia lebih baik. Bantuan tersebut ialah dari APBN dialokasikan untuk masalah kemiskinan yang ada di Indonesia sejak tahun 2007 sampai sekarang yang biasanya diserahkan langsung kepada masyarakat berupa sembako, program pemerintah ini dinamakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bantuan sosial pangan berbentuk nontunai dari pemerintah yang diberi teruntuk KPM tiap bulan lewat mekanisme akun elektronik yang dipergunakan sekadar guna membeli bahan pangan dipedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank negara indonesia (BNI).

Manfaat BPNT ini ialah mampu naiknya ketahanan pangan pada tingkatan keluarga penerima dan juga selaku mekanisme perlindungan sosial serta pengentasan kemiskinan, naiknya efisiensi distribusi bantuan sosial, naiknya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keuangan serta perbankan. Sistem yang sudah dipergunakan selama penyaluran BPNT ini mempergunakan kartu yang sifatnya ialah multifungsi, yakni selaku e-wallet yang mampu menyimpan data penyaluran bantuan pangan pula fungsinya

ialah selaku kartu tabungan. Lewat system terkait, bantuan pangan non tunai bakal langsung disalurkan kepada rekening penerima manfaat dalam perihal ini e-wallet sekadar mampu dipergunakan guna membeli barang sesuai program yang ditentukan pemerintah.

Pada tahun 2018 tertera di badan pusat statistik indonesia tahun 2022 bahwasanya pemerintah pertama kali menurunkan ataupun melaksanakan pencairan bantuan pangan non tunai (BPNT) pada bulan april pada awal pencairan ini sampai akhir tahun yakni pada bulan desember pemerintah menyalurkan bantuan dengan nominal senilai Rp110.000,00/kpm dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebesar 15,5 juta keluarga di seluruh Indonesia. Pemerintah memberikan kebijakan baru bahwasanya meningkatkan nominal yang bakal diberi teruntuk keluarga penerima manfaat yang awal mulanya pada tahun 2018 sebesar Rp110.000,00/kpm kini menjadi Rp150.000,00/kpm dan kebijakan ini bertahan hingga tahun 2020 pada bulan Februari dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebesar 15,6 juta keluarga di seluruh Indonesia. Pada tahun 2020 paa bulan Januari serta Februari jumlah nominal yang di turunkan oleh pemerintah masih sama yakni Rp150.000,00/kpm kemudian kebijakan ini berubah pada bulan Maret 2020 sampai bulan Desember 2021, pemerintah menaikkan angka nominal sebesar Rp50.000,00/kpm yang akan di berikan kepada setiap keluarga penerima manfaat menjadi Rp200.000,00/kpm dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebesar 18.8 juta keluarga di seluruh Indonesia.

Pemerintah pada saat ini menghimbau masyarakat Indonesia khususnya yang sudah mampu untuk mengundurkan diri dan membuat surat pernyataan bahwasannya disurat pernyataan tersebut tertulis pengakuan keluarga

tersebut sudah dikatakan mampu. Pemerintah menegaskan jika ada yang tidak mengundurkan diri dari bantuan tersebut dan diketahui oleh pemerintah pusat padahal keluarga tersebut mampu bahkan memiliki mobil maka keluarga tersebut dikenai sanksi yang dituangkan kedalam:

“Undang-undang Republik Indonesia No. 13 pasal 42 dan 43 tahun 2011 perihal Penanganan Fakir Miskin.”

Sanksi yang dimaksud ialah teruntuk tiap individu yang memalsukan data verifikasi serta validasi akan dikenai pidana penjara paling lama 2 tahun ataupun denda paling banyak Rp50.000.000,00 serta tiap individu yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin akan dipidana penjara paling lama 5 tahun ataupun denda paling banyaknya ialah Rp500.000.000,00 pula korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin dipidanakan dengan denda paling banyaknya ialah Rp750.000.000,00. Meskipun tingkat kemiskinan kini sudah mulai menurun tapi tetap saja banyak oknum – oknum yang mengambil kesempatan dalam hal ini dan banyak juga dari pemerintah yang tak pas sasaran.

Bantuan pangan non tunai ataupun yang biasanya disingkat BPNT ini ialah pengentasan kemiskinan serta ketimpangan ekonomi oleh pemerintah yang diberi lewat kupon elektronik yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk ATM yang bekerjasama dengan pihak bank negara Indonesia (BNI) kemudian ditukarkan pada e-warong yang di sediakan oleh pemerintah didaerah-daerah yang sudah di tentukan. Berdasar kepada

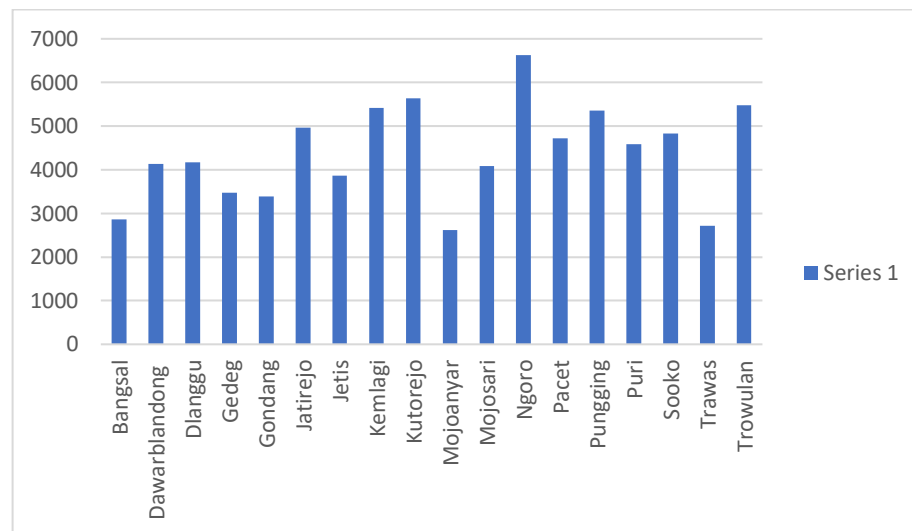
“peraturan menteri sosial republik Indonesia No. 11 tahun 2018 perihal penyaluran bantuan pangan non tunai”

Dijelaskan bahwasanya penerima manfaat mendapatkan hasil bumi (pangan) penerima manfaat ataupun KPM hanya mampu memperoleh hasil bumi berupa karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral sesuai jumlah dan kapasitas yang diinginkan, mampu saja setiap KPM memilih beras (karbohidrat) saja ataupun telur (protein) saja dengan jumlah nominal yang ditentukan oleh pemerintah bukan produk hasil prabik, tapi dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan pangan 4 sehat 5 sempurna dan masyarakat hanya mampu memilih bahan pangan yang disediakan e-warong dengan ketentuan kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian tujuan BPNT bukan hanya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi oleh pemerintah melainkan juga memberi nutrisi yang seimbang.

Provinsi Jawa Timur juga ikut andil dalam program bantuan pangan non tunai ini tapi tak sepenuhnya ikut campur dalam program bantuan non pangan karena kebijakan apa saja yang dibagikan berupa sembako itu tergantung ataupun kebijakan ini diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh sebab itu maka pemerintahan Provinsi Jawa Timur hanya sebagai pengawas penyaluran program bantuan pangan non tunai tersebut.

Kabupaten Mojokerto mempunyai jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi, jika dibandingkan dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) sangat sedikit jumlah KPM yang berada pada Kabupaten Mojokerto dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin berdasar kepada grafik penduduk miskin pada Kabupaten Mojokerto ada ribuan jiwa sementara pada jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang ada fenomena ini tidak sebanding. Sudah terdapat kebijakan yang cukup jelas bahwasanya penyaluran BPNT ditetapkan oleh pemerintah kota/kabupaten tapi pada Kabupaten Mojokerto

kebijakan ini di berikan kepada pemerintah daerah masing-masing. Jadi, meskipun satu kabupaten tetap berbeda kebijakan sebaran program bantuan pangan non tunai, tergantung pemerintah daerah setempat.

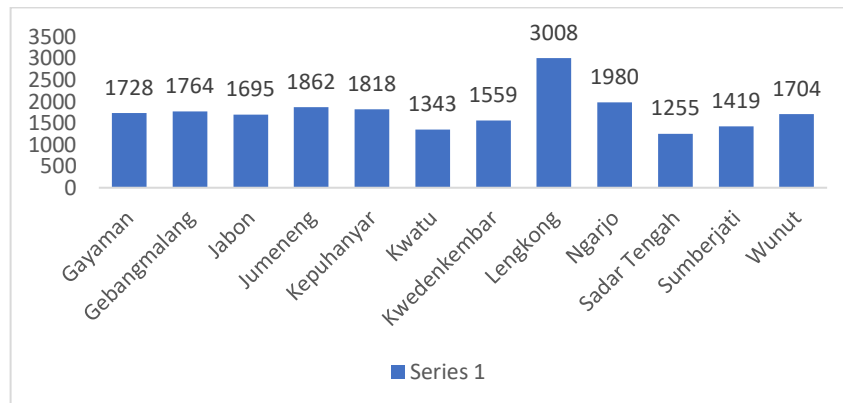


Grafik 1. 2 Jumlah PKM BPNT Kabupaten Mojokerto

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan grafik diatas jumlah keluarga penerima harapan bantuan pangan non tunai terendah ialah apa kecamatan Mojoanyar yakni sebesar 2612 penduduk.

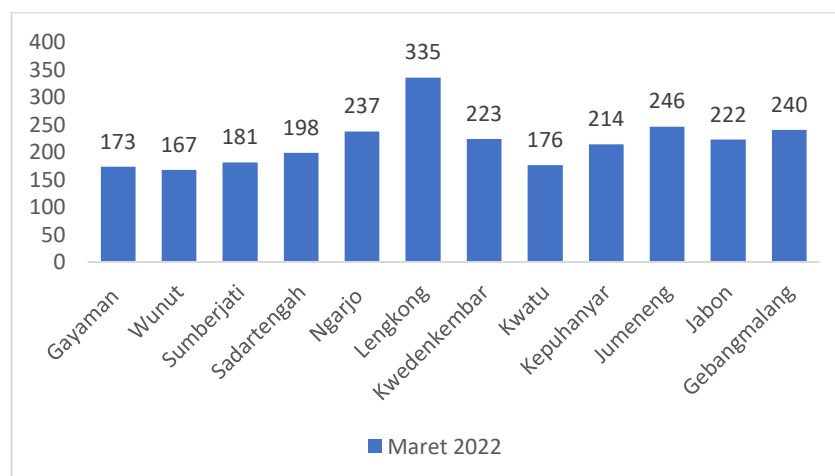
Mojoanyar ialah salah satu nama kecamatan yang ada pada Kabupaten Mojokerto, Prvinsi Jawa Timur, Indonesia. Mojoanyar ialah kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Puri, Mojoanyar diresmikan sebagai kecamatan baru mulai tahun 2004.



**Grafik 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Mojoanyar Tahun 2021
(Ribuan Jiwa)**

Sumber Data : DTKS Kecamatan Mojoanyar

Masyarakat Kecamatan Mojoanyar juga mendapatkan bantuan yang disediakan oleh pemerintah seperti halnya program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan non tunai (BPNT), dll. Berikut keluarga penerima manfaat (KPM) BPNT yang ada pada Kecamatan Mojoanyar



Grafik 1. 4 Jumlah KPM BPNT di Kecamatan Mojoanyar Bulan Maret (JIWA)

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan grafik di atas jumlah keluarga penerima manfaat pada Desa Ngarjo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto menduduki peringkat ke tiga terbanyak pada Kecamatan Mojoanyar setelah Desa Lengkong, Desa Jumeneng setelah itu Desa Ngarjo dengan jumlah KPM BPNT sebesar 237 jiwa.

Desa ngarjo ialah desa yang berada di wilayah Kecamatan Mojoanyar kabupaten mojokerto provinsi jawa timur. Dulu ialah daerah kecamatan bangsal, setelah didirikannya Kecamatan Mojoanyar selaku wilayah pemekaran dari separuh area Kecamatan Bangsal serta separuh area Kecamatan Puri, area terkait hasil pemekaran antara dua wilayah terkait.

Berdasarkan DTKS Kecamatan Mojoanyar jumlah penduduk miskin di Desa Ngarjo terbanyak ke-2 setelah Desa Lengkong dengan jumlah sebesar 1980 jiwa terdiri dari Dusun Tlasih, Ngengor, Jangar, Babatan. Hal ini menunjukkan bahwasanya desa ngarjo masih tergolong desa yang miskin dengan empat dusunnya, sementara jumlah penduduk yang mendapatkan bantuan sosial khususnya bantuan pangan non tunai sebanyak 237 jiwa yang ada pada Desa Ngarjo. Hal ini menunjukan 75% penduduk miskin di Desa Ngarjo Tidak mendapatkan BPNT makanya dengan tujuan di adakan nya BPNT kesejahteraan masyarakat Desa Ngarjo cukup rendah dengan tingkat kemiskinan nomer 2 terbanyak perdesa di Kecamatan Mojoanyar.

Fenomena yang terjadi setelah melakukan observasi awal bahwa di Desa Ngarjo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojoketo terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) yang menukarkan kupon e-voucher yang diturunkan oleh pemerintah di agen BNI umum kemudian di tukarkan dengan barang hasil olahan pabrik, yang sebenarnya tidak diperbolehkan tetapi para

keluarga penerima manfaat ini tetap menukarkan atau membelanjakan e-voucher di agen umum.

Selain itu fenomena yang terjadi di Desa Ngarjo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto adalah jumlah nominal yang sisa setelah dibelanjakan atau ditukarkan ini tidak dibiarkan di dalam atm melainkan di mintai dengan bentuk uang tunai, yang seharusnya tetap berada dalam atm untuk pembelian selanjutnya jika dibutuhkan di kemudian hari dan sisa nominal tersebut harus berupa barang tidak boleh berupa uang tunai.

Fenomena yang ke tiga yaitu bahwa Kartu ATM ataupun e-voucher BPNT yang diturunkan pemerintah untuk perantara penyaluran BPNT ini ternyata juga mampu digadaikan, dalam hal ini terdapat masyarakat ataupun keluarga penerima manfaat (KPM) Desa Ngarjo yang menggadaikan kartu perantara untuk proses penyaluran bpnt tersebut.

Bantuan pangan non tunai (BPNT) ini bermanfaat teruntuk ketahanan pangan pada tingkatan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai pula selaku mekanisme perlindungan sosial serta pengentasan kemiskinan, efisiensi pemberian bantuan sosial, akses masyarakat kepada pelayanan keuangan serta perbankan, dan transaksi non tunai serta mampu membantu perekonomian pada daerah khususnya usaha mikro serta usaha kecil pada bidang niaga. Maka penulis tertarik untuk menilik secara mendetail perihal program bantuan pangan non tunai pula pengaruh terhadap menanggulungan tingkat kemiskinan melalui studi berjudul: "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NASIONAL BANTUAN PANGAN NON

TUNAI DI KABUPATEN MOJOKERTO (STUDI KASUS DI DESA NGARJO KECAMATAN MOJOANYAR)".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti ialah bagaimana implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai dalam menanggulangi kemiskinan pada Desa Ngarjo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat dari latar belakang serta rumusan masalah bahwasanya penelitian ini ditujukan guna menganalisis implementasi kebijakan program bantuan pangan non tunai pada Desa Ngarjo Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharap membada dampak yang positif. Berikut ialah manfaat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian berikut secara teoritis dapat membantu ataupun memberi manfaat pada dunia pendidikan dan di harapkan menambah wawasan perihal dampak implementasi kebijakan nasional bantuan pangan non tunai.

2. Manfaat Praktis

Penelitian berikut mampu dijadikan selaku referensi penelitian selanjutnya dan mampu menjadi pertimbangan di peneliti selanjutnya.